

BAB III

ANCAMAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA JEPANG

Kekuatan militer merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh negara untuk menjamin keamanan nasional dari ancaman internal maupun eksternal. Kekuatan militer yang berusaha untuk ditingkatkan menjadikan sebuah negara dianggap agresif dan aktivitas yang dilakukan terkesan mengancam (Herz, 1950). Keamanan nasional yang harus dilindungi terdiri dari tiga skala besar secara umum yang meliputi keamanan di daratan, di lautan dan di udara.

Seperti yang kita tahu, negara yang memiliki wilayah kelautan tidak dapat melepaskan perhatiannya terhadap keamanan wilayahnya yang terjaga eksploitasi sumber dayanya, jalur laut atau jalur perdagangannya, serta pengamanan yang stabil terhadap wilayah daratannya. Sistem keamanan setiap negara kian berubah dan meningkat seiring dengan perubahan sistem internasional yang terjadi. Hal itu sejalan dengan munculnya ancaman atau gangguan-gangguan yang ada, mengharuskan negara melakukan upaya untuk menciptakan keamanan wilayah kelautannya berupa wilayah teritorialnya maupun wilayah lautan lepas demi kepentingan negara maupun kepentingan dunia internasional. Wilayah kelautan saat ini menjadi perhatian besar bagi negara khususnya di wilayah samudera Pasifik yang sebagian besar melakukan kegiatan perekonomian disini.

A. Komplektivitas Keamanan di Wilayah Asia Timur

Isu keamanan menjadi hal yang menarik untuk dikaji dan diikuti perkembangannya, terutama keamanan di kawasan atau regional. Barry Buzan dalam bukunya menyebutkan bahwa keamanan di dalam suatu kawasan pada dasarnya merupakan sebuah fenomena yang relasional (Buzan, 1987).

Asia Timur merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya yang melimpah dan menguntungkan bagi sektor

perekonomian negara di kawasan. Selain potensi ekonomi yang kaya dan sebagai tempat jalur perdagangan yang menguntungkan, negara di wilayah Asia Timur memiliki dinamika hubungan yang kompleks dalam hubungan antar negara didalamnya. Kekuatan yang besar yang dimiliki oleh negara anggota ini yang kemudian memancing berbagai potensi konflik. Salah satu contohnya adalah Jepang sebagai negara pemimpin di Asia Timur yang memiliki kecanggihan teknologi, China sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia dengan perkembangan ekonominya yang pesat dan juga Korea Utara dengan potensi nuklir yang dianggap dapat mengancam kawasan. Dibalik keuntungan yang ada, kawasan Asia Timur ini memiliki potensi konflik diantara negara didalamnya, seperti muncul adanya sengketa wilayah teritorial, ancaman terhadap keamanan nasional dan kecurigaan terhadap negara tetangga yang memicu peningkatan kapabilitas militer negara (Acharya, 2003).

Dinamika ancaman dan kecurigaan yang muncul diantara negara-negara di kawasan Asia Timur ini tidak lepas dari sejarah yang mengikat mereka. Negara *super power* yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet yang menjajah sebagian besar wilayah Asia Timur ini, pada akhir peperangan membagi daerah kekuasaan mereka. Beberapa negara dunia ketiga di Asia Timur yang terkena dampak akibat rivalitas mereka yakni Korea yang terpisah menjadi dua negara yang berdaulat yaitu Korea Utara dan Korea Selatan yang merdeka pada tahun 1945. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, China juga terpecah menjadi dua bagian, yaitu Republik Rakyat China yang kita sebut sebagai Tiongkok dan Pemerintah Nasionalis Republik China di Taiwan. Vietnam juga sempat terkena dampak rivalitas negara *super power*, dimana Vietnam pernah terpecah menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan yang kemudiana dapat bersatu kembali pada 3 Juli 1976 dan resmi bergabung menjadi anggota PBB pada tahun 1977. Akhir dari rivalitas negara *super power* ini kemudian membawa perubahan bagi dunia kedalam sebuah tatanan baru, yakni tatanan

internasional yang bersifat multipolar yang mempunyai implikasi signifikan bagi sebuah keamanan regional. Harapan mengenai terjalannya kerjasama kemudian muncul guna terciptanya perdamaian dan stabilitas keamanan yang ingin dicapai melalui pendekatan baru mengenai keamanan berupa kerjasama multilateralisme keamanan di kawasan Asia Pasifik (Acharya, 2003).

Kerjasama regional yang dijalin tidak kemudian dapat berjalan dengan lancar. Konflik-konflik internal di negara kawasan Asia Timur tak dapat dielakkan. Seperti halnya kemerdekaan Korea Utara dan Korea Selatan atas pembagian kekuasaan wilayah yang berbeda, dan atas dasar idealisme yang berbeda kemudian menimbulkan adanya konflik saudara. Ketegangan pun mulai terjadi hingga pada tahun 1950, Korea Utara mengambil tindakan agresif dengan melewati perbatasan dan melakukan invasi atas Korea Selatan. Tindakan yang dilakukan ini merupakan awal mula terjadinya perang diantara kedua negara yang kemudian berlangsung tiga tahun lamanya hingga diberlakukannya gencatan senjata oleh PBB (KBRI Seoul, 2013).

Seiring berjalannya waktu, kedua negara kemudian mulai menata kembali kehidupan sosial, politik dan ekonominya. Dalam membangun kembali kehidupan ekonomi dan politiknya, kedua negara masih saling terikat dan membutuhkan. Walaupun begitu, perang resmi diantara kedua negara masih terjadi dikarenakan Korea Utara maupun Korea Selatan belum bersedia untuk menandatangani perjanjian damai (KBRI Seoul, 2013). Usaha-usaha untuk mendamaikan kedua negara juga sering dilakukan. Hal tersebut dilakukan bukan hanya untuk mendamaikan kedua negara namun juga untuk menjaga keamanan di kawasan dan dunia internasional. Seperti yang kita tahu, Korea Utara semenjak mandiri mulai melakukan pengembangan senjata nuklir yang tentu saja dikhawatirkan jika konflik saudara tidak segera diselesaikan, Korea Utara akan terus melakukan poliferasi nuklir yang dapat membahayakan (Airin, 2013).

Ditangan Mao Zedong, China menjadi negara yang membuka diri terhadap dunia luar dan mulai melakukan kerjasama dengan negara lain dan aktif terlibat dalam sistem internasional. Hal ini yang kemudian disebut sebagai *Open Door Policy* China. *Open Door Policy* ini yang melatarbelakangi terjadinya modernisasi di China yang memiliki fokus pada empat bidang utama yang meliputi bidang pertanian, industri dan teknologi, pendidikan dan yang paling penting adalah bidang pertahanan (Airin, 2013).

Untuk bidang pertahanan, China cukup agresif dengan mengalokasikan dana yang mumpuni demi membangun armada militer yang besar dan kuat. Berawal pada tahun 2000, anggaran militer China mengalami peningkatan yang cukup besar dari USD 14,6 miliar sampai sekitar USD 45 miliar pada tahun 2009 (Yani, 2004). Hal ini menarik perhatian Australia yang memperkirakan bahwa China dibalik kenaikan anggaran militernya juga menyembunyikan fakta modernisasi militernya yang melampaui pertahanan nasionalnya dan hal tersebut dapat mengancam keamanan regional. Badan intelijen Australia juga menyebutkan bahwa dana militer China meningkat pesat pada tahun 2006 dari jumlah USD 90 miliar menjadi total USD 45 miliar pada tahun 2009 (Blasko, 2005). China juga memantapkan strategi militernya dengan memenangkan perang modern dalam kualitas teknologi yang tinggi, dan memperkuat kekuatan pertahanan laut.

Hebatnya lagi, China juga menjadi salah satu negara yang tidak lagi bergantung kepada negara lain untuk urusan pembelian perlengkapan dan peralatan senjata militer. Melalui kekuatan ekonomi, sumber daya dan industri yang dimiliki oleh China menjadikan China dapat membangun swadaya militer dengan memproduksi peralatan militer pribadi. Hasil peralatan militer yang mereka produksi antara lain seperti produk jet tempur, pesawat tempur dan kapal selam. Pesawat tempur militer yang diproduksi oleh mereka, mesin yang digunakan bukan lagi berasal dari Rusia tetapi mesinnya murni dari China yang lebih canggih (Perdana, 2018). Keadaan ini tentu saja berdampak langsung kepada Jepang yang kemudian

menganggap kondisi ini sebagai sebuah ancaman yang perlu diperhatikan.

Konflik lainnya datang dari China dan Jepang yang sama-sama berkompetisi dalam bidang teknologi, ekonomi dan militer. Kehadiran Amerika Serikat dan kebangkitan China di kawasan Asia Timur memperkeruh tekanan konflik di regional. Sejak lama, Amerika Serikat menjadi aktor lain yang hadir dan memiliki aliansi keamanan dengan Jepang dan Korea Selatan dan China memiliki kedekatan hubungan dengan Korea Utara dengan berlandaskan kepada persamaan ideologi. China dan Korea Utara memiliki hubungan yang cukup harmonis dan telah menjalin kerjasama bilateral yang mumpuni. China secara terang-terangan mendistribusikan pasokan listrik kepada Korea Utara dan juga bantuan ekonomi. Hal tersebut dilakukan China untuk mendukung pengembangan nuklir milik Korea Utara pada tahun 2007 ketika Korea Utara mengumumkan kepemilikan nuklirnya. Pengembangan dan uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara memang telah menarik perhatian dunia internasional karena memiliki potensi ancaman yang cukup berbahaya. Namun, hal tersebut berbanding terbalik bagi China, karena bagi China, Korea Utara merupakan sekutu yang menguntungkan dalam sektor militer dan pertahanan di kawasan. Kedekatan China dan Korea Utara juga didukung oleh Rusia sebagai penyokong utama mereka dalam bidang kemiliteran (Airin, 2013). Namun, setelah empat taun melakukan dukungan terhadap Korea Utara, China secara perlahan mengendurkan relasi dengan Korea Utara. Hal itu ditandai dengan pernyataan perdana menteri Yang Jiechi pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa China menolak sejumlah uji coba pengembangan persenjataan nuklir Kim Jong Un. Selain itu, Korea Utara juga melanggar aliansi utama dengan China pada Mei 2013 Korea Utara menyita kapal nelayan China dan meminta tebusan.

Sebagai negara yang diharuskan menjadi negara pecinta damai, Jepang berada dalam posisi yang dilematis dalam

menghadapi ancaman di kawasan. Namun, tidak berarti bahwa Jepang hanya duduk manis menyikapi ancaman yang dapat mengancam keamanan nasionalnya. Disini, Jepang sudah pasti memanfaatkan adanya aliansi yang sudah terjalin sejak lama dengan Amerika Serikat dalam peningkatan kekuatan dan pertahanan militernya. Jepang juga meningkatkan anggaran militernya yang dulunya hanya sekitar satu persen dari pendapatan negara menjadi sekitar sepuluh persen. Hal ini dilakukan oleh Jepang karena melihat kompleksitas keamanan di kawasan yang membuat Jepang takut yang akhirnya membuat Jepang meningkatkan kapabilitas militernya untuk melindungi keamanan nasional. Jepang juga menggunakan *soft diplomacy* dengan menjalin hubungan bilateral dengan negara lain, salah satunya adalah keterlibatan Jepang dalam *Australian Group* sebagai kemampuan *offensive power* Jepang menghadapi kekuatan militer China.

B. Ancaman Rudal Korea Utara

Korea Utara sebagai negara yang agresif dalam urusan militer membuat Korea Utara memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan negara-negara di Asia Timur khususnya negara tetangga seperti Jepang. Diangkatnya Kim Jong Un menjadi pemimpin Korea Utara membawa ketegangan yang cukup serius dikarenakan Kim Jong Un secara terang-terangan menunjukkan gigi taringnya atas kebijakan militernya yang agresif. Negara-negara di Asia Timur merubah kebijakannya dalam bidang militer mejadi *defensive* dalam rangka merespon tindakan Korea Utara.

Kim Jong Un sebagai pemimpin Korea Utara memiliki kekuasaan otoriter atas Korea Utara dalam urusan kebijakan. Dari awal kepemimpinannya, Kim Jong Un menunjukkan kemauannya yang kuat untuk memposisikan Korea Utara secara strategis sebagai negara yang kuat. Ini ditandai dengan keberhasilan Korea Utara membawa program nuklirnya ke tingkat berikutnya. Kim Jong Un memulai dengan ambisi baru

dan segar menuju kelanjutan pengembangan program nuklir yang ditunjukkan oleh pencabutan Kim Jong Un dalam pidato yang disiarkan televisi pada *New Year's Day*: "Penelitian dan pengembangan senjata teknologi mutakhir secara aktif berkembsng dan menguatkan kapabilitas pertahanan kami, termasuk persiapan tahap terakhir pengujian untuk peluncuran roket balistik internasional telah berhasil secara berkesinambungan" (Missile Defense Advocacy Alliance, 2017).

Negara-negara di Asia Timur berusaha untuk memajukan pertahanan nasionalnya masing-masing dengan cara meningkatkan kekuatan militer, khususnya dalam pengembangan senjata nuklir seperti yang dilakukan oleh Korea Utara (Buzan, 2003). Potensi konflik kawasan khususnya pada pengembangan senjata nuklir Korea Utara ini dinilai oleh negara-negara di Asia Timur sebagai sebuah ancaman yang besar dan berbahaya. Senjata nuklir sendiri menjadi permasalahan bagi keamanan dunia ketika senjata nuklir dijadikan sebagai strategi negara untuk mengimbangi kekuatan militer negara lain. Senjata nuklir sebenarnya dapat digunakan oleh negara untuk mencapai kepentingannya dengan menitikberatkan kepada sebuah bentuk pertahanan (*nuclear defense*).

Penggunaan teknologi nuklir oleh suatu negara diamati karena itu menuntut keamanan dan keselamatan yang tinggi, kemungkinan penyimpangan senjata, dan rawan terhadap pemerasan politik (Sormin, 1994). Korea Utara telah beberapa kali melakukan uji coba senjata rudal yang berupa rudal balistik. Beberapa kegiatan uji coba nuklirnya tersebut oleh Kementerian Luar Negeri Korea Utara dinyatakan sebagai sebuah latihan rutin militer Korea Utara dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Dengan ketidakikutsertaan dalam keanggotaan *Missile Technology Control Regime* (MTCR) dan tidak terikat oleh hukum atau perjanjian internasional apapun mengenai uji coba nuklir

membuat Korea Utara sedikit bebas melakukan uji coba (nti.org, 2018).

Pada tahun 2006 Korea Utara secara resmi menarik diri dari rezim *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) yang membuat Korea Utara secara terang-terangan melakukan uji coba nuklirnya. Kim Jong Un yang diangkat menjadi presiden Korea Utara karena meninggalnya Kim Jong Il pada tahun 2011 pernah diragukan kepemimpinannya karena dirasa belum siap untuk memimpin Korea Utara. Sebelum duduk di kursi parlemen Kim Jong Un memfokuskan dirinya sebagai jenderal tertinggi angkatan senjata terlebih dahulu untuk menguasai kontrol militer. Maksud dari tujuan Kim Jong Un disini adalah agar ia dapat mewarisi alat control terpenting negara dan juga berlakunya kebijakan “*military first*” milik Kim Jong Il (Choe, 2011).

Kemudian, Kim Jong Un dalam arah kebijakan dalam negeri maupun luar negerinya menyatakan tidak akan mengubah arah kebijakannya. Hal ini direalisasikan dengan menyetujui penangguhan uji coba senjata nuklir dan program pengayaan uranium milik Korea Utara, dan mengizinkan pihak internasional memeriksa bagian utama mesin nuklir Korea Utara. Sebagai gantinya, Korea Utara meminta sekitar ratusan ton bantuan makanan dari Amerika Serikat (S.H & Meyers, 2012).

Kesepakatan yang terjalin antara Korea Utara dan Amerika Serikat tersebut tidak bertahan lama, ditandai dengan kembalinya pola agresif Kim Jong Un dengan diumumkannya kembali bahwa mereka akan meluncurkan satelit ke luar angkasa dalam rangka memperingati hari ke-100 tahun Kim Il Sung. Dengan peluncuran satelit ini, Korea Utara secara tidak langsung melenceng dari Resolusi Dewan Keamanan PBB yang berisi tentang perintah untuk memberhentikan peluncuran roket menggunakan rudal yang menjangkau antar benua kepada Korea Utara (Tribun News, 2012). Kejadian ini tentu saja menarik perhatian Jepang yang merasa tindakan

Korea Utara ini dapat memicu adanya ketegangan di kawasan dan khususnya terhadap keamanan nasional Jepang.

C. Respon Jepang Dan Dewan Keamanan PBB Terhadap Uji Coba Nuklir Korea

Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklir secara besar-besaran dan hal tersebut dilakukan secara intensif. Tindakan Korea Utara atas uji cobanya mendapatkan sorotan dari dunia internasional ditambah dengan pengkaliman kepemilikan senjata nuklir dan bom hidrogen. Pengembangan senjata nuklir ini membuat Jepang yang notabene merupakan negara tetangga merasa terancam karena beberapa kali uji coba rudal yang dilakukan oleh Korea Utara dapat menjangkau wilayah Jepang. Salah satu rudal yang menjangkau Jepang adalah uji coba yang dilakukan pada tanggal 7 Februari 2016 lalu yang melewati wilayah Okinawa bagian selatan. Hal tersebut tentu saja mendapatkan kecaman dari pihak lain karena hal tersebut melanggar sanksi yang diberikan kepada Korea Utara oleh PBB yang melarang Korea Utara untuk tidak menggunakan senjata berbau nuklir. Namun, Korea Utara mengklaim hal tersebut merupakan sebuah uji coba peluncuran satelit untuk memantau bumi (Cnn Indonesia, 2016). Perdana Menteri Shinzo Abe secara tegas mengatakan bahwa peluncuran roket tersebut tidak bisa diterima oleh Jepang, karena hal tersebut cukup membuat warga Jepang trauma.

1. Respon Dewan Keamanan PBB

Uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara sejak lama ini telah mendapat kecaman dan terguruan dari negara lain bahkan dari pihak dunia internasional. Dewan keamanan PBB yang memiliki peranan penting dalam tatanan perdamaian di kancah internasional ikut serta memantau perkembangan kepemilikan senjata Korea Utara atas senjata nuklir yang

menyebabkan ketegangan di Asia Timur. Korea Utara kini disebut-sebut sebagai negara yang memiliki senjata nuklir terkuat diantara negara-negara berkembang, bahkan Korea Utara sedang mengembangkan rudal balistik yang mampu melintasi benua (*Intercontinental Ballistic Missile*) (Bermudez, 1999). Progam pengembangan senjata nuklir ini mempengaruhi terjadinya kemerosotan perekonomian di suatu negara seperti China, Jepang, Korea Selatan bahkan Amerika Serikat dan juga negara lainnya. Kemudian muncul kekhawatiran dunia internasional akan terjadinya perlombaan senjata antar negara.

Melihat adanya ketegangan di kawasan Asia Timur dan kemungkinan bahaya yang akan terjadi akibat uji coba senjata nuklir Korea Utara, Dewan Keamanan PBB yang memiliki perananan dan tanggung jawab dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional ikut andil dalam isu ini. Seperti yang telah tertulis dalam Piagam PBB pasal 24 ayat (1) yang berbunyi “Negara-negara anggota PBB telah melimpahkan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan PBB mengenai masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip dan tujuan Piagam PBB. Dewan Keamanan PBB juga memiliki wewenang dalam menangani persengketaan dan situasi yang mengusik perdamaian dan keamanan internasional yang merupakan tanggung jawab utama Dewan Keamanan PBB. Pada Piagam PBB pasal 24 ayat (2), Dewan Keamanan PBB juga diberikan kekuasaan lebih untuk tidak hanya bertindak pada saat dunia tegang tetapi juga ikut andil dalam permasalahan yang terkait dengan ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian, tindakan agresi negara, kesepakatan kawasan, dan sistem perwalian internasional (Council, 2013).

Dalam menangani kasus Korea Utara, disini Dewan Keamanan PBB tidak langsung begitu saja mengambil tindakan yang agresif menilik dari kegiatan Korea Utara yang dianggap belum menjurus pada ancaman perdamaian

internasional. Namun, hal itu kemudian berubah pada uji coba rudal Korea Utara yang dilakukan pada tahun 2006 berupa rudal balistik jarak jauh. Menyikapi uji coba rudal yang dilakukan oleh Korea Utara, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No. 1695 (2006) yang berisi kecaman atas uji coba rudal Korea Utara karena hal tersebut merupakan tindakan yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan PBB juga meminta kepada Korea Utara untuk menghentikan semua kegiatan yang berkaitan dengan program nuklir rudal balistik.

Isi dari beberapa Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait uji coba senjata nuklir Korea Utara adalah sebagai berikut:

1. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1540 (2004)
2. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1695 (2006)
3. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1718 (2006)
4. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1874 (2009)
5. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2087 (2013)
6. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2141 (2015)
7. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2207 (2015)
8. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2094 (2016)
9. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2321 (2016)
10. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2270 (2017)
11. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2371 (2017) yang berisi kecaman atas peluncuran rudal balistik yang dilakukan pada bulan Juli (S/PV.8019). Resolusi ini secara signifikan memperkuat sanksi dengan memberlakukan larangan penuh dalam kegiatan eksportir batubara, besi dan bijih besi dari Korea Utara yang menjadi mata pencaharian pokok.
12. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2375 (2017) yang berisi penambahan sanksi pada sektor ekonomi Korea Utara sebagai tanggapan dari uji coba nuklir. Resolusi ini berisi pelarangan impor tekstil yang diproduksi di Korea Utara, pelarangan

ekspor gas, dan menetapkan batasan ekspor produk minyak bumi dan minyak mentah ke Korea Utara dalam rangka meminimalisir dan menghentikan penyelundupan barang-barang terlarang ke laut lepas.

13. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2407 (2018) yang berisi perpanjangan mandat Panel Pakar Komite Sanksi untuk Korea Utara No. 1718 hingga April 2019.

Dengan keluarnya Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut (Security Council Report, 2018) yang diawali pada tahun 2006, Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa uji coba rudal balistik milik Korea Utara pada Resolusi No. 1695 tersebut dikeluarkan karena itu merupakan tanggung jawab Dewan Keamanan PBB atas perdamaian dan keamanan internasional (*Acting under its special responsibility for the maintenance of international peace and security*). Resolusi yang dikeluarkan ini juga mengikat secara hukum dan negara dapat dikenakan sanksi atas tindakannya seperti Korea Utara yang menghindari hak veto dari China yang merupakan sekutu Korea Utara (BBC News, 2012).

2. Respon Jepang

Jepang sebagai negara yang pernah mengalami trauma akibat pemboman nuklir di distrik Hiroshima dan Nagasaki memusatkan perhatian besarnya terhadap potensi nuklir yang dimiliki oleh negara lain khususnya Korea Utara. Pengembangan senjata nuklir dan uji coba rudal yang dilakukan oleh Korea Utara ini menarik perhatian Jepang secara penuh karena menjadi negara yang paling berpotensi terkena dampaknya. Korea Utara secara agresif melakukan pengembangan uji coba senjata nuklirnya, bahkan pada 10 Januari 2003 melalui *Korean Central News Agency* mengumumkan secara resmi keluar dari anggota NPT. NPT (*Treaty on The Non-Proliferation of Nuclear Weapons*)

merupakan suatu perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli 1968 yang bertujuan membatasi kepemilikan senjata nuklir yang terkait dengan komitmen pelucutan senjata nuklir, non-proliferasi, dan penggunaan bahan nuklir untuk tujuan damai. Sejak itu, Korea Utara menunjukkan adanya perkembangan dalam memproduksi nuklir yang mengalami peningkatan dari tahun 2003 hingga 2009.

Keluarnya Korea Utara dari NPT membuat Korea Utara menunjukkan keberaniannya di mata internasional dengan coba melakukan uji nuklir pada tahun 2006 sampai dengan 2009. Uji coba nuklir ini tentu saja mendapatkan penentangan dari dunia internasional khususnya dari negara Jepang, sebab uji coba nuklir tersebut dilakukan bukan dengan tujuan untuk perdamaian.

Respon Jepang terhadap poliferasi nuklir Korea Utara dapat kita lihat pada periode tahun 2003 sampai dengan 2011. Pada tahun 2003, Jepang saat itu masih dipimpin oleh Perdana Menteri Junichiro Koizumi yang dimana pada keputusan militernya masih menggunakan *soft diplomacy* secara penuh. Junichiro Koizumi dalam Pers Pemerintah Jepang pada tanggal 14 Januari 2003 mengatakan akan mengambil langkah damai dalam mengatasi ancaman dari Korea Utara melalui perundingan, seperti dilakukannya *normalization talks*. Sekretaris Pers Pemerintah Jepang mengumumkan pernyataan Jiro Okuyama yakni “*With North Korea, the most important avenue for us that we have the process of normalization talks between Japan and North Korea*” (Jiro, 2003). Noriyuki Shikata selaku Sekretaris Pers Pemerintah mengatakan Jepang sangat terbuka untuk melakukan perbincangan dengan pihak Korea Utara. Jepang juga melakukan pertemuan dengan negara-negara anggota PPB dalam rangka melakukan koordinasi.

Pada uji coba nuklir yang dilakukan tanggal 25 Mei 2009, pemerintah Jepang melakukan protes atas tindakan tersebut melalui “kedutaan rute” di Beijing mengenai

pengumuman uji coba nuklir oleh Korea Utara (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2009). Tara Aso sebagai Perdana Menteri yang sedang menjabat mengatakan bahwa uji coba nuklir yang dilakukan pada saat itu tidak bisa diterima oleh pihak Jepang karena telah memberi ancaman yang besar terhadap keamanan Jepang. Menurutnya, efek radiasi yang dipancarkan atas uji coba nuklir membuat pihak Jepang kemudian mengadakan pertemuan dengan Komite Konsultasi Inter-menteri dalam rangka melakukan tindakan tolak-radiasi. Jepang juga melakukan kerjasama dengan kementerian dan organisasi yang terkait untuk memperkuat sistem pengukuran tingkat radiasi dan menanggapi secara menyeluruh bekerjasama dengan negara terkait untuk tercapainya tujuan (Aso, 2009).

Pemerintah Jepang juga memikirkan tentang dampak yang akan diterima akibat uji coba nuklir oleh Korea Utara. Seperti kasus peluncuran rudal yang menyebabkan adanya guncangan bermagnitudo sekitar 6 sr di wilayah Korea Utara merupakan dampak dari uji coba nuklir. Untuk melihat lebih jauh, Jepang mengirimkan tiga buah pesawat jet militer untuk memeriksa dampak radiasi (Kompas.com, 2017). Menindaklanjuti lebih jauh atas keputusan Korea Utara yang mengatakan akan menanggihkan uji coba nuklirnya ditanggapi dengan rasa tidak puas oleh Jepang. Ini dilakukan oleh Pemerintah Jepang karena menganggap bahwa penanggihan yang dilakukan belum sepenuhnya, yang artinya Korea Utara tidak meninggalkan rudal balistik jarak pendek dan jarak menengah yang sekiranya dapat mengancam keamanan Jepang (Christiastuti, 2018).

Melalui *Korean Central News Agency* (KCNA), Korea Utara menyatakan akan menanggihkan uji coba rudal dan nuklir serta penutupan uji coba nuklir. Hal itu dilakukan oleh Korea Utara dengan maksud untuk mencukupi kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan juga menghilangkan ketegangan di Semenanjung Korea. Dunia internasional menyambut dengan

baik atas keputusan Korea Utara ini, namun tidak bagi Jepang. Jepang menganggap bahwa Korea Utara tidak secara penuh meninggalkan uji coba nuklirnya. Pemerintah Jepang masih waspada atas senjata nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara karena selama ini Jepang selalu menjadi sasaran atas uji coba nuklirnya yang dimana kawasan Jepang selalu dilewati oleh rudal yang diluncurkan. Dampak radiasi dan guncangan yang cukup kuat yang ditimbulkan oleh uji coba nuklir Korea Utara menjadi konsentrasi Jepang dalam melindungi masyarakatnya. Oleh karena itu, Jepang tetap menegaskan tidak akan mengubah arah kebijakannya dalam menekan Korea Utara untuk meninggalkan sepenuhnya senjata pemusnah massal, senjata nuklir dan rudal balistik atau menanggukkan “denuklirisasi”.

Sebelumnya, Jepang sebenarnya telah mencoba untuk mengurangi ketatnya arah kebijakan pemerintah Jepang terhadap Korea Utara sebagai upaya untuk mempertahankan hubungan yang harmonis dengan Korea Utara. Ada beberapa pertimbangan yang menyebabkan Jepang melakukan hal itu (Nack, 2006). Alasan pertama, China mulai bergerak maju dengan melakukan kerjasama dengan Korea Utara dan Korea Selatan dalam bidang ekonomi dan militer dimana Jepang menganggap dengan terbentuknya kerjasama dengan Korea Utara dapat membawa Jepang mampu bersaing dengan kekuatan negara lain. Kedua, Jepang mempercayai bila Jepang menjalin hubungan yang baik dengan pihak Korea Utara maka hal itu dapat mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea dan juga di kawasan. Ketiga, Jepang ingin menguasai kekuatan ekonomi di dunia dimulai dengan menguasai ekonomi kawasan Asia Timur. Keempat, program uji coba nuklir Korea Utara menjadi perhatian khusus bagi Jepang yang selalu melewati wilayah teritorial Jepang dan juga mengenai beberapa kasus penculikan warga dan kapal Jepang oleh agen Korea Utara. Keempat alasan diatas menjadikan Jepang ingin menormalisasikan hubungan yang terjalin antara Jepang dan Korea Utara demi kebaikan dan keamanan nasional Jepang.

D. Trauma Masyarakat Jepang Atas Uji Coba Nuklir

Uji coba nuklir dan peluncuran rudal oleh Korea Utara tentu menarik perhatian masyarakat Jepang dan cenderung mengalami trauma. Trauma disini dimaksudkan bahwa Jepang menjadi satu-satunya negara yang pernah hancur oleh senjata nuklir. Kebanyakan dari masyarakat Jepang yang wilayah teritorialnya pernah dilewati oleh rudal Korea Utara dilanda ketakutan yang luar biasa. Seperti halnya wilayah pulau Hokkaido yang berada di jalur peluncuran nuklir Korea Utara (Reza, 2017).

Trauma yang dialami oleh masyarakat Jepang mempengaruhi kegiatan sehari-hari mereka. Seperti yang dilansir oleh Reuters, masyarakat Jepang kerap melihat ke luar dan mengamati keadaan sekitar ketika tiba-tiba mendengar suara keras atau suara ledakan. Ketakutan yang melanda juga diakibatkan karena rudal yang melintas tidak bisa dilihat secara langsung ketika melintas. Kekhawatiran atas kemungkinan rudal mendarat di wilayah Jepang juga membuat masyarakat Jepang melakukan aktivitas lain seperti mengumpulkan makanan kaleng untuk persiapan dan mendengarkan radio secara rutin untuk mengetahui informasi dari Pemerintah Jepang. Masyarakat Jepang bahkan mempertanyakan kapasitas yang dimiliki oleh pimpinan internasional dalam menghadapi Korea Utara yang meresahkan (Astiana, 2017).

Kekhawatiran ini tidak luput dari perhatian Pemerintah Jepang, bahkan menyebutkan bahwa uji coba nuklir ini sebagai ancaman yang serius bagi Jepang. Dalam merespon rasa trauma yang timbul di kalangan masyarakat, Pemerintah Jepang mengerahkan penduduknya untuk mencari tempat perlindungan. Pemerintah Jepang juga membuat lokasi penampungan untuk mengantisipasi jika kemungkinan ada serpihan rudal yang mendarat di wilayah darat dan perairan Jepang.

Kekhawatiran lain yang dirasakan oleh masyarakat Jepang adalah adanya pangkalan militer Amerika Serikat yang

berada di pulau Okinawa Jepang. Keberadaan pangkalan militer ini dirasa sangat dekat dengan masyarakat Jepang karena berjarak beberapa meter dari rumah warga. Ketakutan mereka adalah bahwa kemungkinana suatu hari nanti akan terkena dampak serangan misil secara langsung oleh Korea Utara yang ingin menyerang Pangkalan Militer AS (Hasan, 2017). Ketakutan ini terus berlanjut dengan semakin tegangnya hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan, dan juga ketegangan antara Korea Utara dengan Amerika Serikat. Terdapat dua hal yang ditakutkan oleh masyarakat Jepang yakni ketakutan mengenai rudal Korea Utara sanggup mencapai Jepang dan ketakutan atas lokasi pangkalan militer Amerika Serikat yang tak jauh dari rumah warga.